

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap langkah kebijakan ekonomi harus dinilai apakah memang mengacu pada tiga prinsip utama yakni: pertumbuhan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan. Ketiga prinsip itu secara langsung memiliki muatan politis. Maka, kajian tentang persoalan ekonomi, tidak terlepas hubungannya dengan politik dan pemerintahan¹ dan di situ kita melihat bahwa para pemimpin pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kumpulan individu-individu yang memiliki kepribadian dan cara pandang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap kebijakan sosial, politik, ekonomi dan budaya akan selalu dilandasi dengan – selain nalar – naluri. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh manusia (baca: Penguasa) itu selalu dipengaruhi oleh naluri yang seringkali mengacaukan rasionalitas individu tanpa memandang jenis kelamin dan jabatan, pada akhirnya kebijakan yang diambil adalah sebetuk persoalan instrumental yang nantinya menimbulkan berbagai persoalan mulai dari skala terkecil seperti individu, sampai yang terbesar seperti negara.²

Faktisitas politik-kekuasaan yang tak dapat disangkal kehadirannya, dan mewarnai hampir semua lini kehidupan masyarakat dunia saat ini adalah ekonomi. Sebagaimana mahasiswa baru di fakultas filsafat akan belajar terkait asal-usul dari

¹RBE Agung Nugroho & Sigit B. Khrisna (ed.), dalam B. Herry-Priyono, *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), hal. xiii

² *Ibid.*

kata filsafat yang berasal dari kata Yunani *philosophia* yang adalah cinta (*philia*) kebijaksanaan (*sophia*) yang dikatakan bahwa umumnya istilah itu datang dari Pythagoras, yakni orang yang mencintai kebijaksanaan.³ Begitu juga setiap mahasiswa baru di fakultas ekonomi akan belajar tentang asal-usul dari kata Ekonomi yang juga berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*. Dari situ, terbentuk *oikonomia* (tata kelola rumah tangga) dan *oikonomike* (seni mengelola rumah tangga).⁴ Istilah ekonomi datang dari Xenopohon, filsuf Yunani yang hidup sekitar 430-354 SM, sebagai judul salah satu karyanya *OIKONOMIKO* (*oikonomikos*).⁵

Akhir-akhir ini, di seluruh dunia sedang dihadapkan pada satu persoalan besar yakni resesi ekonomi. Perang antara dua negara menunjukkan bahwa dalam batin manusia tetap tertanam pengalaman penindasan maupun inklinasi natural manusia teknologis yang ingin memelihara keabadian keberadaannya dengan menaklukan dan ingin menguasai yang lain. Inklinasi ini dalam konteks kontemporer ini yang ditopang oleh gelombang besar globalisasi ekonomi yang menerabas batas-batas politik, kekuasaan hingga gaya hidup. Akibat perkembangan zaman, pertukaran barang, atau transaksi pembelian yang dulunya membutuhkan waktu, ruang, dan jarak tempuh, kini semua itu tinggal buih verbal cerita masa lalu.⁶

³ F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal. 13

⁴ B. Herry-Priyono, *Ekonomi Politik, Op. Cit.*, hal. 97

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 18. Pemotongan waktu-ruang itu pula berlangsung dalam globalisasi ekonomi. Dahulu kala, untuk membeli sepatu baru yang bagus di Kupang (tempat), seseorang dari Atambua harus menghabiskan sehari perjalanan (waktu). Artinya, proses jual-beli menuntut temu muka antara penjual dan pembeli, suatu peristiwa yang hanya bisa terjadi dengan pertemuan keduanya pada titik waktu dan ruang yang sama (kesatuan waktu-ruang). Akan tetapi, sekarang, transaksi jual beli dapat dilakukan

Dengan kata lain, pekerjaan pemasaran (*marketing*) dalam ekonomi modern merupakan usaha mencabut keterikatan waktu dari ruang. Akibat ketercabutan itu, “dunia tidak lagi sunyi karena jarak-waktu-ruang, tetapi riuh rendah dengan lalu lintas pertukaran barang, gagasan, perasaan, sampai perkara-perkara maya (*virtual*). Sehingga sebagai arena tindakan, dunia kian menjadi satu unit. Sedangkan sebagai rentang wawasan, dunia kian menjadi satu arena”.⁷

Semakin intensifnya globalisasi sangat dipengaruhi oleh revolusi teknologi informasi, sementara pengetahuan ekonomi itu pun turut mengglobal. Sehingga penyebaran informasi yang cepat memporak-porandakan tradisi dan kebiasaan, memaksa cara pendekatan yang baru yang lebih aktif dan terbuka terhadap kehidupan. Akibat dikelilingi oleh inovasi ilmiah yang cepat, globalisasi memberi kontribusi yang besar terhadap munculnya persoalan serta resiko yang lebih besar. Bahwa globalisasi ekonomi itu nyata berbeda dari proses serupa – transaksi barang – pada masa lalu kiranya sulit untuk dibantah. Sebagai contoh, ambillah dunia obat-obatan. Bisnis obat yang *booming*, mencapai US\$430 miliar di tahun 2002, melonjak US\$ 66 miliar dari tahun 2001. Di tangan 5-10 perusahaan raksasa obat, margin keuntungan mereka paling besar di antara semua bisnis yang ada di bawah langit, bahkan lebih besar keuntungannya dari bank-bank komersial. Namun, di antara 1.393 jenis obat yang dikembangkan selama periode 1975-1999, hanya 16 jenis obat

dalam sekejap lewat telepon dan *email* antara penjual di Kupang dan pembeli di Atambua, tetapi pada titik waktu yang sama (keterpisahan waktu dari ruang).

⁷ *Ibid.*, hal. 28

yang diperuntukan bagi penyakit-penyakit kaum miskin. Dengan kata lain, setiap orang miskin tidak punya hak atas kesehatan karena tidak memiliki uang.⁸

Persoalan-persoalan ini sungguh melelahkan untuk dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebab penerabasan gelombang globalisasi politik-ekonomi mengemuka lewat gejala dominasi kekuatan pasar kapitalistik negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah yang dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi. Di situ, teknologi yang mengawaki globalisasi ekonomi menampakkan wajahnya dalam tindakan pengawasan, penataan, klasifikasi maupun kategori. Ketika sampai pada problem kategori, seperti negara Dunia Pertama, Dunia Kedua dan Dunia Ketiga, Dalam ketiga dunia ini terdapat ketimpangan ekonomi yang besar dan pelemahan terutama atas negara-negara dunia ketiga, seperti di Asia kecuali Jepang dan Cina, beberapa negara di Timur Tengah, maupun Afrika.⁹

Sampai di sini, kita perlu bertanya: siapa dalang di balik sistem yang membuat seluruh umat manusia tidak bisa keluar dari lingkaran belenggu globalisasi ini? Di sini kita perlu melihat kembali pola lama bahwa ada “sejarah perkawinan hasrat, tindakan dan gagasan. Namun, gagasan rupanya lebih sering direka-reka sesudahnya membenarkan hasrat dan tindakan. Apa pun isinya. Pola tersebut yang kemudian diadopsi oleh model ilmu ekonomi modern, di mana bermuara menuju satu agenda, yakni: bagaimana membuat persoalan ekonomi tampak seperti peristiwa alam, seperti

⁸ *Ibid.*, hal. 59

⁹ Yasintus T. Runesi, *Pengakuan Intersubjektif Axel Honneth Sebagai Prinsip Proeksistensi Dalam Masyarakat Plural*, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2015), hal. 2-3

tsunami yang memang terpaksa diterima sebagai kenyataan”.¹⁰ Sehingga untuk menunjukkan bahwa persoalan resesi ekonomi ini tampak seperti bencana alam, para penguasa berusaha untuk menyembunyikan sedalam mungkin rahasia-rahasia kejahatan yang terisolasi dalam kata-kata, dengan cara mengubah pertanyaan “siapa dalang dari semua ini” menjadi “apa tujuan dari kebijakan ini”. Dengan demikian, siasat itu berhasil menghindari analisis ekonomi yang dapat beresiko pada kerugian. Kapitalisme-neoliberal membawa masuk asumsi utopisnya ke dalam cara hidup manusia yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk bahagia di dalam tata pasar. Dengan dominasi yang demikian, yang kaya berjuang untuk tetap menguasai akses kepada sumber-sumber material ekonomi sambil berupaya menutup akses bagi yang miskin.¹¹

Oleh karena itu, apa yang kemudian dikatakan oleh Amartya Sen bahwa pembangunan sebuah negara tidak hanya bisa dilihat dari sisi pendapatan per kapita, melainkan juga pembangunan manusia (*human development*). Dengan begitu, bukan hanya pemerintah sendiri yang berusaha untuk menemukan solusi bagi persoalan ekonomi global, melainkan seluruh masyarakat mulai dari yang paling bawah sampai

¹⁰ Herry-Priyono, *Ekonomi Politik, Op. Cit.*, hal. 98

¹¹ Cf. Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, trans. Arthur Goldhammer, (Cambridge, MA/London, UK: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014), part. III; Cf. Harry Braverman, *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*, (New York: Monthly Review Press, 1998), hal. 13

para pejabat negara, bersama-sama mencari jalan keluar agar kemacetan ekonomi dapat di atasi.¹²

Amartya Sen seorang ekonom tulen tetapi juga seorang filsuf sosial, tampil ditengah-tengah dunia yang semakin kacau oleh persoalan ekonomi ini dengan konsepnya tentang kapabilitas dan kesejahteraan (*welfareism*). Ketika semua ekonom bahkan Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern masih terjebak dalam konsepnya tentang kepentingan-diri, atau seperti yang dikatakan oleh Francis Y. Edgeworth bahwa “prinsip pertama ekonomi adalah setiap orang digerakkan (*actuated*) hanya oleh kepentingan-diri (*only by self-interest*)”.¹³ Maka, Sen muncul dengan konsepnya tentang kapabilitas. Konsep kapabilitas (*capability*) menurut Sen berarti “kemampuan untuk mencapai”. Pendekatan kapabilitas dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana: “secara aktual, apakah seseorang bisa melakukan apa dan menjadi apa?” dan pertanyaan berikutnya adalah: “kesempatan real apa yang ia miliki untuk melakukan ini dan menjadi itu?”¹⁴

Salah satu kritik Sen adalah “bagaimana kita dapat sampai pada putusan-putusan agregat yang meyakinkan tentang masyarakat, bahwa masyarakat lebih

¹² Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press), hal. 13-15

¹³ F. Y. Edgeworth, *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*, (London: Kegan Paul & Co., 1881), hal. 16

¹⁴ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial, Demokrasi dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 19

memilih ini daripada itu, atau mayoritas masyarakat seharusnya memilih ini daripada itu, atau apakah ini benar secara sosial?”¹⁵

Dengan penguasaan analisis yang tajam, Sen berusaha mengkaji berbagai pendekatan guna mengukur kepincangan dan merumuskan sebab-akibat disparitas ekonomi. Bila kita membaca seluruh karya yang ditulis oleh Sen, kita menemukan bahwa perhatian Sen berfokus pada persoalan kemiskinan, kelaparan, identitas, kesejahteraan, ketidakadilan ekonomi dan kebebasan. Tentang kelaparan misalnya, Sen menulis demikian: kelaparan dapat terjadi bukan karena tidak ada makanan yang tersedia (karena orang bisa lapar ditengah keberlimpahan makanan) akan tetapi, kelaparan terjadi karena tidak adanya akses yang tersedia bagi mereka yang miskin atau dimiskinkan oleh kekuasaan (*by the power*).¹⁶

Di satu sisi, Sen yang merupakan seorang ahli ekonom tidak serta-merta menerima apa yang sudah diterima umum, di mana ekonomi dilihat hanya sebatas pemenuhan kepentingan-diri. Di lain sisi, Sen yang juga merupakan filsuf sosial, yang menekankan pentingnya kajian etis dalam setiap kebijakan ekonomi. Dalam bukunya *On Ethics and Economics*, Sen menunjukkan adanya penciptaan jarak yang serius antara ekonomi dan etika bahkan buku itu dianggap semacam gangguan oleh para ahli ekonomi yang telah nyaman dengan pandangan ekonomi arus utama. Landasan argument Sen dalam bukunya itu, terletak pada pendapatnya bahwa ekonomi dapat dibuat lebih produktif dengan memberikan perhatian lebih besar dan

¹⁵ Sen, *Rationality and Freedom*, (Cambridge, MA: Belknap Press, 2002), hal. 66

¹⁶ Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, (Oxford: Oxford University Press, 1981), hal. 1

eksplisit terhadap pertimbangan-pertimbangan etika yang membentuk perilaku dan penilaian manusia.¹⁷

Krisis yang ada sekarang dalam bidang politik dan ekonomi memang harus diatasi. Sehingga tidak menghilangkan kepercayaan dan respek dari masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang paham *develompentalisme*, pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi sangat diwarnai oleh kepercayaan yang hidup dalam diri masyarakat, tetapi tidak akan berjalan secara alamiah. Ignas Kleden pernah mengatakan bahwa “krisis ekonomi dan krisis sembako yang tidak diselesaikan jelas sekali akan menimbulkan keresahan sosial yang tinggi dan meningkatnya kriminalitas, yang pada gilirannya akan menghancurkan apa pun yang telah tercapai dalam bidang politik”.¹⁸

Hari-hari ini kita di hadapkan pada persoalan-persoalan yang rupanya rumit dan sulit diselesaikan. Kita bisa melihat itu dalam berbagai media pemberitaan baik cetak maupun digital. Kita bisa melihat bahwa “di ranah politis, ada perseteruan partai-partai, ancaman dan jaringan terorisme internasional, korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara, perampasan tanah ulayat oleh pemerintah atas nama pembangunan; sedangkan di ranah ekonomis, ada pasar-pasar senjata yang membuka medan perang baru, ada pasar-pasar gelap untuk perdagangan perempuan, organ

¹⁷ Catatan pengantar John M. Letiche, dalam Amartya Sen, *On Ethics and Economics*.

¹⁸ Ignas Kleden, *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 202

dalam, narkoba dan semacamnya; dan dalam ranah sosial, adanya konflik antar kelompok suku dan agama”¹⁹.

Melalui siaran televisi, internet, toko buku, kita menikmati segala program dari berbagai belahan dunia. Yang berarti bahwa masyarakat dunia telah masuk ke dalam dapur, ruang keluarga, bahkan kamar tidur kita; telah membentuk cara kita berpikir, selera ataupun cara kita berekspresi. Hal ini menjadi suatu kosmopolitanisme yang banal. Oleh karena itu, manusia semakin merasa bahwa telah menemukan identitasnya karena mampu berhubungan dengan semua orang, tetapi justru kehilangan identitas sosialnya. Sebab aspek-aspek realitas direproduksi tanpa henti, lewat berbagai cara dalam kepastian teknologi, tanpa orang merasa tertipu. Berdasarkan pemahaman ini, penulis berusaha menelisik konstelasi filosofis Amartya Sen tentang Rasionalitas dan Naluri ekonomi dengan sebuah judul: **MEMBONGKAR RASIONALITAS DAN NALURI KEKUASAAN EKONOMI MENURUT PEMIKIRAN AMARTYA SEN**

1.2 Rumusan Masalah

Agar proses pencarian dan penelusuran jejak-jejak pemikiran filosofis Amartya Sen mengenai problem rasionalitas dan naluri yang berfokus pada maksimalisasi kepentingan-diri ini dapat terorganisir dengan baik, maka penulis menyusun beberapa pertanyaan penuntun.

¹⁹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikaliseme Agama, sampai Post-Sekularisme*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018), hal. 78-79

1. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk ekonomi?
2. Apa yang dimaksud dengan kesesatan rasionalitas?
3. Apa yang dimaksud dengan naluri manusia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, penulisan ini bertujuan untuk menggali pemikiran Amartya Sen tentang problem rasionalitas dan naluri yang destruktif dalam kaitan dengan kekuasaan ekonomi. Pada Bagian ini, penulis berusaha meneliti, menemukan, dan menganalisis pokok-pokok pemikiran yang ada di dalamnya. Dan tujuan lainnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Katolik Widya Mandira Kupang melalui Fakultas Filsafat, guna memperoleh gelar sarjana filsafat

1.3.1 Inventarisasi

Penulis akan mengumpulkan, menganalisis dan mengolah pemikiran Amartya Sen yang tersebar di berbagai literatur, baik yang ditulisnya sendiri maupun tokoh-tokoh yang menulis tentangnya

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia

Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih intelektual yang berharga bagi masyarakat luas terutama warga negara Indonesia demi membentuk

dan meningkatkan pemahaman terkait pentingnya peran rasionalitas dalam setiap kebijakan ekonomi di suatu negara.

1.4.2 Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Umumnya dan Fakultas Filsafat Khususnya

Penulis sebagai mahasiswa pada lembaga pendidikan Unwira sejauh ini telah menimba berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat. Penulisan ini adalah wujud eksistensi penulis bagi lembaga pendidikan ini. Wujud paling konkret ini akan ditampakkan dengan komitmen untuk merampungkan ide-ide bagi lembaga pendidikan yang telah memberikan dan mendidik penulis agar menjadi manusia yang manusiawi.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Adalah sesuatu yang urgen bahwa melalui penulisan ini, kemampuan intelektual penulis untuk membaca realitas yang ada saat ini dan mengkajinya menjadi ide-ide yang akan terus terbawa abadi. Selain itu, penulisan ini mendorong penulis untuk semakin memperluas dan memperdalam wawasan berpikir mengenai persoalan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang pasti bahwa semuanya ini adalah bekal yang berharga bagi penulis untuk nantinya terjun ke tengah masyarakat.